MANAJEMEN SARANA PRASARANA KOMPLEKS STADION JALAK HARUPAT

Dadi Ginanjar Patradilaga^{1*}, Yudha Munajat², Nuryadi³

Keywords :

Match Management;
Satisfaction Level;
Athletes; Clubs

Correspondensi Author

¹ Universitas Pendidikan
Indonesia

patradilaga4@gmail.com

² Universitas Pendidikan
Indonesia

yudhamsaputra@upi.edu

³ Universitas Pendidikan
Indonesia

nuryadi_71@upi.edu

ABSTRACT

The research objective was to see the Management of Infrastructure for the Jalak Harupat Stadium Complex. The research subject is the Youth and Sports Agency (BPO). Officials of Dispora, and administrators of UPTD of the Jalak Harupat stadium complex in Bandung Regency, which represent 6 people, 3 administrators of Dispora and 3 administrators of UPTD. The data technique uses the method of observation, interviews, and documentation. The analysis technique uses the Miles and Huberman model, which is called an interactive data analysis technique where data analysis is carried out interactively and continuously until it is complete, so that the data is saturated. The research results are as follows; 1) the development of the Jalak Harupat stadium complex has not been running optimally 2) the Jalak Harupat stadium complex requires a maintenance budget 3) the mobility of supervision in the Jalak Harupat stadium complex is constrained. Based on the various existing problems, the role of the management of youth sports bodies and administrators of the UPTD of the Starling Harupat stadium is very much needed in solving this problem of infrastructure management.

Article History

Received: September 2020;

Reviewed: September 2020;

Accepted: Oktober 2020;

Published: Oktober 2020.

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Manajemen Sarana Prasarana Kompleks Stadion Jalak Harupat. Subjek penelitian adalah badan pemuda dan olahraga (BPO). Pengurus Dispora, dan pengurus UPTD kompleks stadion jalak harupat Kabupaten Bandung yang berjumlah 6 orang, 3 pengurus Dispora dan 3 pengurus UPTD. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan model Miles dan Huberman, yang disebut dengan istilah teknik analisis data interaktif dimana analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Hasil penelitian sebagai berikut; 1) pembangunan kompleks stadion jalak harupat belum berjalan optimal 2) kompleks stadion jalak harupat membutuhkan anggaran pemeliharaan 3) terkendalanya mobilitasi pengawasan di kompleks stadion jalak harupat. Berdasarkan berbagai permasalahan yang ada maka peran Pengurus badan pemuda olahraga dan pengurus UPTD stadion jalak harupat sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah manajemen sarana prasarana ini.

PENDAHULUAN

Sarana olahraga adalah sesuatu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan olahraga atau pendidikan jasmani yang dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu peralatan (*apparatus*) dan perlengkapan (*device*) (Soepartono, 2000). Sedangkan prasarana didefinisikan sebagai sesuatu yang mempermudah dan memperlancar tugas dan memiliki sifat yang relatif permanen (Soepartono, 2000). Namun, infrastruktur olahraga yang memadai adalah penting untuk partisipasi olahraga, karena banyak olahraga tidak dapat dilakukan tanpa memiliki fasilitas olahraga yang sesuai (Hallmann, Wicker, Breuer, & Schönherr, 2012).

Berbicara olahraga dengan fasilitas secara bertahap selama dua dekade terakhir ini sangat meningkat secara global, namun peristiwa ini berdampak pada pembangunan fasilitas (Gunduz & Tehemar, 2019). Meskipun banyak pengamat jarang mengutip bahwa dalam setiap pembangunan fasilitas olahraga akan mendapatkan hak warisan sepenuhnya (Wilson, 2015).

Dengan demikian dalam perspektif pengembangan sistem perencanaan pembangunan pada suatu negara seiring dengan demokrasi sistem politik yang dianut sangat tepat kiranya apabila konsep SDP menjadi bagian integral di dalamnya, yaitu melalui RPJPN secara khusus di bidang olahraga (Ma'Mun, 2007).

Struktur nasional untuk membangun dan mengelola fasilitas olahraga akan menambah pemahaman, tergantung bagaimana kebijakan dan politik Pengelolaan sarana prasarana olahraga di masing-masing kota atau kabupaten dengan tujuan menjadikan sebuah gaya hidup sehat bagi masyarakat setempat (Bergsgard, Borodulin, Fahlen, Høyer-Kruse, & Iversen, 2019). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Bergsgard, 2017) menyatakan bahwa, Jika kebijakan fasilitas harus muncul sebagai sarana utama untuk mencapai tujuan kesejahteraan olahraga dan olahraga untuk

semua, secara *de facto* merupakan barang universal, maka kebijakan dan struktur fasilitas olahraga seharusnya lebih bersifat pemerintah daripada pemerintahan.

Salah satu tujuan manajemen sarana prasarana dituangkan dalam Sistem Undang-Undang Keolahragaan Nasional Pasal 67 ayat 1 secara garis besar Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti pada studi pendahuluan, peneliti menduga bahwa terdapat masalah pada Manajemen Sarana Prasarana Kompleks Stadion Jalak Harupat. Penyebab manajemen sarana prasarana tersebut yaitu 1) pembangunan kompleks stadion jalak harupat belum berjalan optimal 2) kompleks stadion jalak harupat membutuhkan anggaran pemeliharaan 3) terkendalanya mobilitasi pengawasan di kompleks stadion jalak harupat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *sampling purposive*. Keabsahan dilakukan dengan meningkatkan ketekunan, triangulasi teknik dan menggunakan bahan referensi.

Sesuai dengan penelitian ini yaitu untuk mengetahui manajemen perencanaan Stadion Jalak Harupat sebagai sarana prasarana olahraga. Metode pengukuran kinerja untuk saat ini hanya memberikan wawasan terbatas tentang apa yang sebenarnya terjadi di fasilitas olahraga. Selain itu ada beberapa perbandingan pro dan kontra dari berbagai metode pengukuran kinerja yang telah dibuat. Untuk menginformasikan penelitian, kebijakan, dan strategi manajemen fasilitas olahraga, kami membandingkan dua metode baru dalam mengumpulkan informasi kinerja.

Metode pertama mengumpulkan informasi kinerja melalui manual survei. Metode kedua menggunakan kamera (Iversen, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa ketiga responden sepakat yang menjadi tujuan dari Manajemen Sarana Prasarana Kompleks Stadion Jalak Harupat perlu adanya perbaikan-perbaikan agar mencapai pada target yang ingin dituju. Perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan kompleks stadion jalak harupat tidak berjalan dengan optimal dikarenakan beberapa kendala yang belum terselesaikan. Maka dari itu perlunya evaluasi untuk lebih mengoptimalkan agar manajemen sarana prasarana kompleks stadion jalak harupat bisa berjalan dengan optimal.

Perencanaan

Visi Dinas Pemuda dan Olahraga

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah penanggung jawab di bidang kepemudaan dan keolahragaan dalam merealisasikan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bandung untuk mencapai Visi Kabupaten Bandung, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung merumuskan Visi sebagai berikut: “Terwujudnya **Masyarakat Kabupaten Bandung yang maju, mandiri dan berdaya saing melalui pengembangan Kepemudaan dan Olahraga berprestasi**”.

Kabupaten Bandung diharapkan menjadi unggul di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dalam naungan semangat spiritual yang diwujudkan dalam ikatan ihsan. Dengan demikian, suatu aktivitas bidang kepemudaan dan keolahragaan senantiasa dilandasi dengan prestasi. Kabupaten Bandung mencita-citakan terwujudnya Pembangunan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan yang memiliki wawasan untuk maju, mandiri, dan berdaya saing melalui mengembangkan kepemudaan untuk olahraga berprestasi dalam upaya mencapai Visi Kabupaten Bandung.

1. Misi: Meningkatkan Pelayanan Keolahragaan

Untuk mewujudkan cita-cita/keinginan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung yang tertuang dalam Visi Kepemudaan dan Keolahragaan Kabupaten Bandung, diperlukan suatu perencanaan Program/Kegiatan Organisasi yang harus dilaksanakan sesuai dengan Kewenangan, Tugas, dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung menyusun Misi sebagai berikut :

a. Misi Dinas Pemuda dan Olahraga

Menggali potensi sumberdaya pemuda dan olahraga Kabupaten Bandung, memberdayakan aktivitas dan organisasi kepemudaan yang mandiri, mengembangkan prestasi olahraga yang unggul, mengembangkan sistem informasi kepemudaan dan olahraga, mendorong sektor swasta dalam partisipasi pengembangan kepemudaan dan olahraga.

b. Tujuan dan sasaran

Sesuai dengan misi Dinas Pemuda dan Olahraga, maka tujuan yang hendak dicapai. Pada Misi, antara lain: Memantapkan potensi sumberdaya olahraga dan meningkatkan pengembangan kepemudaan dalam berolahraga, memberdayakan aktivitas dan organisasi kepemudaan yang mandiri, mengembangkan prestasi olahraga yang unggul, mengembangkan sistem informasi kepemudaan dan olahraga, mendorong sektor swasta dalam partisipasi pengembangan kepemudaan dan olahraga. Dari Tujuan diatas dapat dirumuskan sasaran sebagai berikut: Optimalisasi perencanaan pembinaan kepemudaan dan terwujudnya kerjasama dan koordinasi antar daerah, mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan serta pergerakan pemuda, mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas permasalahan, mengembangkan

potensi keterampilan dan kemandirian berusaha, membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda, pembinaan Olahraga pendidikan, rekreasi dan prestasi, meningkatkan daya saing olahragawan ditingkat nasional dan internasional, peningkatan jumlah dan kualitas tenaga keolahragaan, terwujudnya ketersediaan ruang terbuka atau sarana prasarana olahraga. Berdasarkan pada analisis di atas, **proporsi** ke – 1 adalah sebagai berikut : Konsep Kebijakan yang dirumuskan oleh organisasi olahraga harus mengikuti apa yang direncanakan oleh induk dari organisasi olahraga itu sendiri dan implementasi kebijakan itu harus segera dieksekusi agar semua kebijakan tersebut dapat terealisasi.

Pengorganisasian

Prasarana dan Sarana Olahraga (Pasal 67)

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (3) Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah setempat.
- (4) Prasarana olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penetapan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.
- (6) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang selanjutnya diserahkan kepada

pemerintah daerah sebagai aset/milik pemerintah daerah setempat.

- (7) Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah atau pemerintah daerah tanpa rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada analisis di atas, **proporsi** ke – 2 adalah sebagai berikut : Pengorganisasian manajemen sarana dan prasarana olahraga bertujuan untuk mencapai sebuah potensi keolahragaan yang berkembang di daerah setempat dan menghasilkan prestasi olahraga. Organisasi manajemen sarana prasarana pun harus mengetahui tentang manajemen sarana prasarana yang baik, karena itu akan berdampak pada hasil kebijakan yang diberikan kepada masing-masing organisasi itu sendiri.

Pengawasan

Pengawasan (Pasal 87)

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pengawasan dan pengendalian olahraga profesional dilakukan oleh lembaga mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan dari analisis diatas: maka diajukan **proporsi** ke – 3 sebagai berikut: Suatu keberhasilan tidak terlepas dari proses pengawasan yang dilaksanakan dan dilakukan. Proses pengawasan yang sistematis dan terstruktur akan menghasilkan suatu prestasi yang sesuai dengan apa yang diharapkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Perencanaan; Manajemen Sarana Prasarana Kompleks Stadion Jalak Harupat belum dilakukan sesuai dengan Rencana Strategi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung. Hal ini disebabkan oleh faktor anggaran proses pemeliharaan yang lebih kecil di dapatkan dari pemerintah. Dan keterbatasan anggaran sarana prasarana menjadi bukti terhadap SDM yang berada di dalam kawasan kompleks stadion jalak harupat tidak maksimal dan menjadi kendala saat ini.
2. Pengorganisasian; Pengorganisasian yang harusnya berjalan terstruktur tidak dilaksanakan dengan maksimal. Terbatasnya jumlah SDM yang berada dalam kawasan Kompleks stadion jalak harupat serta kendala pelaksanaan pemeliharaan yang tidak berjalan dengan optimal, dikarenakan jumlah anggaran pemeliharaan tidak sesuai.
3. Pengawasan; Sistem pengawasan sarana prasarana kompleks stadion jalak harupat terkendala bukan hanya dari anggaran dan SDM nya saja, tetapi mobilitas yang tidak memungkinkan menjadi kendala para petugas penanggung jawab dilapangan untuk mengontrol setiap masing-masing venue. Karena dengan kawasan yang cukup besar tidak mungkin untuk para petugas mengontrol venue 1 ke venue yang lain dengan berjalan kaki.

Saran

Merujuk dari hasil temuan dan analisa penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka ada beberapa rekomendasi yang bertujuan untuk menjadi bahan evaluasi bagi beberapa pihak agar bisa lebih baik lagi. Rekomendasi ini ditujukan kepada Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Bandung selaku pemangku kebijakan, kemudian kepada peneliti selanjutnya.

1. Pemerintah Daerah (PEMDA)

- a. Perlu dilakukannya kajian bersama antara pihak pemerintah, akademisi dan praktisi olahraga mengenai kebijakan olahraga, guna menanggapi cita-cita yang telah dipaparkan;
- b. Kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan kedepannya diharapkan dilakukan pemerataan, dengan melihat aspek-aspek prioritas pada kondisi setiap masing-masing pengurus sarana prasarana;
- c. Perlu ditingkatkan jalinan kerjasama dalam balutan kolaborasi sesuai dengan visi misi Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Bandung antara pemerintah, insan olahraga serta masyarakat secara umum.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini terbatas pada evaluasi Manajemen Sarana Prasarana Kompleks Stadion Jalak Harupat. Oleh karena itu, ada beberapa rekomendasi bagi peneliti selanjutnya, antara lain:

- a. Peneliti mengharapkan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan fokus penelitian yang sama agar bisa meneliti pada aspek yang berbeda karena masih banyak aspek lain yang memang harus dikaji secara mendalam, guna memperkaya kontribusi keilmuan sebagai bahan evaluasi bersama untuk kedepannya;
- b. Peneliti mengharapkan bagi peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitiannya di daerah yang lain, guna menggali informasi sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Hal ini bertujuan untuk menanggapi cita-cita bersama tidak hanya pada lingkup daerah saja namun juga pada lingkup nasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Soepartono. (2000). Media Pembelajaran. Jakarta: Depdiknas.
- Hallmann, K., Wicker, P., Breuer, C., &

- Schönherr, L. (2012). Understanding the importance of sport infrastructure for participation in different sports - findings from multi-level modeling. *European Sport Management Quarterly*, 12(5), 525–544. <https://doi.org/10.1080/16184742.2012.687756>
- Gunduz, M., & Tehemar, S. R. (2019). Assessment of delay factors in construction of sport facilities through multi criteria decision making. *Production Planning and Control*, 0(0), 1–12. <https://doi.org/10.1080/09537287.2019.1704903>
- Wilson, W. (2015). Sports infrastructure, legacy and the paradox of the 1984 olympic games. *International Journal of the History of Sport*, 32(1), 144–156. <https://doi.org/10.1080/09523367.2014.986110>
- Ma'mun, A. (2007). Pembangunan Olahraga Indonesia yang Berkemajuan. *Jurnal Kajian Pendidikan*.
- Bergsgard, N. A., Borodulin, K., Fahlen, J., Høyer-Kruse, J., & Iversen, E. B. (2019). National structures for building and managing sport facilities: a comparative analysis of the Nordic countries. *Sport in Society*, 22(4), 525–539. <https://doi.org/10.1080/17430437.2017.1389023>
- Iversen, E. B. (2015). Measuring sports facility utilisation by collecting performance information. *Managing Sport and Leisure*, 20(5), 261–274. <https://doi.org/10.1080/23750472.2015.1090885>
- Bergsgard, N. A. 2017. “Spillet om idrettsanleggene – hvilke ressurser er virksomme i lokale anleggsprosesser? [The Sports Facilities Game - What Resources are Effective in Local Facility Processes?]” *Norsk Sosiologisk Tidsskrift* 1 (02): 171–187. Online